



Dampak Ketidaksetaraan Gender dan Variabel Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendidikan: Analisis Data Panel

The Impact of Gender Inequality and Economic Variables on Education Inequality: Panel Data Analysis

Sugeng Setyadi

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: sugeng.setyadi@untirta.ac.id

Submit: 25 Februari 2022; Direvisi; 5 April 2022; Dipublish; 14 April 2022

Abstract

Education plays a central role and becomes one of the goals of sustainable development which must continuously be carried out equitably and can be accessed by anyone without any limitations on geographical conditions or social and economic status. However, the issue of education inequality has recently become a worrying concern, therefore the purpose of this study is to analyze the factors that influence education inequality in the Regency or City of East Java Province where the education inequality is the highest on the island of Java. The data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency and the Ministry of Education. The analytical method used is panel data regression. The results showed that per capita GRDP, literacy rate, government spending in the education sector and gender inequality had an effect on educational inequality. So that government policies are needed that are able to build public awareness of the importance of investment in the field of human capital, and the role of education for women and men in achieving a better quality of life, as well as the need for policy reforms in placing government expenditure allocations for education that are more targeted.

Keywords: Education Inequality; Gender Inequality; Government Expenditure, Panel Data Regression

Abstrak

Pendidikan memainkan peranan sentral dan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang secara terus menerus harus diselenggarakan secara merata serta dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya batasan kondisi geografis ataupun status sosial dan ekonomi. Namun, isu ketimpangan pendidikan akhir-akhir ini menjadi perhatian yang mengkhawatirkan, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur yang ketimpangan pendidikannya tertinggi di Pulau Jawa. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan ketidaksetaraan gender berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan. Sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu membangun kesadaran masyarakat pentingnya investasi di bidang *human capital*, dan peran pendidikan bagi perempuan dan laki-laki dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik, serta perlu adanya pembenahan kebijakan dalam menempatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan yang lebih tepat sasaran.

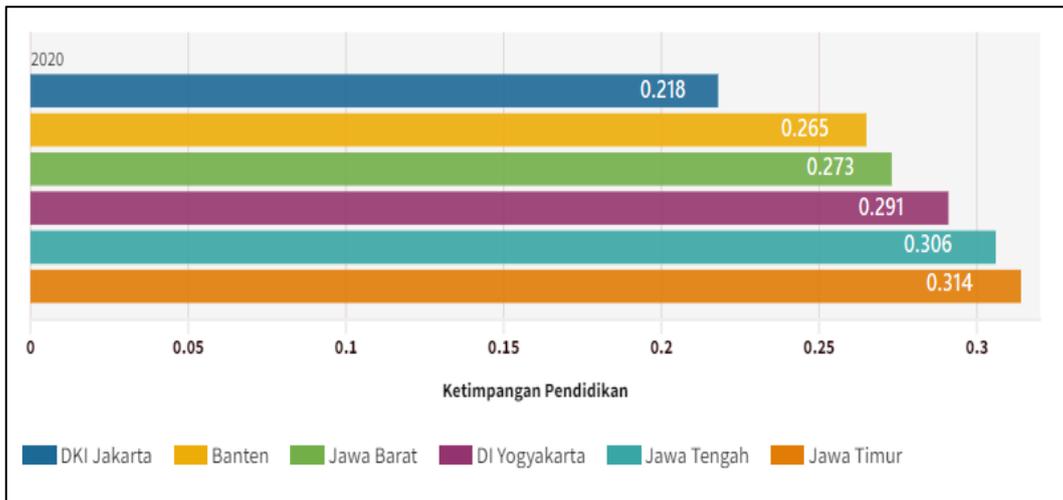
Kata kunci: Ketimpangan Pendidikan; Ketidaksetaraan Gender; Pengeluaran Pemerintah; Regresi Data Panel

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menentukan karakter dalam kecepatan pembangunan ekonomi suatu negara serta mampu dalam meningkatkan produktivitas dan distribusi pendapatan bahkan pada tingkatan mikro (Ozturk, 2001). Disuatu negara sistem pendidikan yang seimbang sangat berperan penting dalam mendorong akumulasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas hidup dan menawarkan kesempatan pekerjaan yang lebih besar untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Sehingga penduduk dengan capaian pendidikan yang tinggi dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan lebih peduli terhadap kesehatan dan umur panjang (OECD, 2008).

Pendidikan juga menjadi salah satu bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan baik secara global maupun nasional yang menjadi bagian dari tujuan ke-4 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan ditargetkan akan tercapai pada tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pendidikan pada poin 4 yaitu untuk menciptakan dan memastikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sekaligus mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua individu. Mengingat peranan sentral pendidikan ini, maka perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting dilakukan secara terus menerus dan harus diselenggarakan secara merata serta dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya batasan kondisi geografis ataupun status sosial ekonomi.

Namun, isu ketimpangan pendidikan akhir-akhir ini menjadi perhatian yang mengkhawatirkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketimpangan pendidikan merupakan suatu keadaan atau kondisi adanya perbedaan pencapaian hasil pendidikan yang terjadi antarwilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendidikan antarpenduduk suatu wilayah adalah koefisien Gini pendidikan. Menurut Thomas et al (2000) koefisien Gini pendidikan berkisar antara 0 hingga satu, koefisien Gini pendidikan yang mendekati nilai satu menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih tinggi dalam pencapaian pendidikan, sedangkan koefisien Gini pendidikan mendekati 0 artinya menunjukkan semakin meratanya pencapaian pendidikan yang terjadi disuatu daerah. Gambaran umum ketimpangan pendidikan yang terjadi antarprovinsi seperti di Pulau Jawa yang menjadi sebagai pusat sentral kegiatan ekonomi dan secara geografis memiliki jumlah lembaga pendidikan lebih banyak berlokasi atau terkonsentrasi secara spasial di dibandingkan dengan luar Jawa (Alun & Sakti, 2007), dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 1: Indeks Ketimpangan Pendidikan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 1. Menunjukkan tingkat ketimpangan pendidikan antarprovinsi di Pulau Jawa pada tahun 2020. Koefisien Gini pendidikan yang terjadi antarprovinsi mengalami perkembangan data yang fluktuatif. Provinsi yang memiliki angka ketimpangan pendidikan terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,218. Sedangkan provinsi dengan angka ketimpangan pendidikan tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 0,314. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Artinya, Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal dalam upaya meratakan pencapaian pendidikan.

Ketimpangan pendidikan yang terjadi pada suatu daerah menunjukkan masih adanya persoalan dari sistem pendidikan yang ada belum sepenuhnya merata dalam memberikan pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua pihak tanpa memandang status ekonomi, sosial, dan politik masyarakatnya. Akibat tingginya tingkat ketimpangan pendidikan yang terjadi pada suatu daerah akan menyebabkan sulitnya masyarakat dalam melakukan perubahan akan kondisi pendidikan yang sudah maju dan berkembang (Suryanti & Sholikhah, 2021). Oleh karena itu pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan menuntut perlunya pemerataan pendidikan di setiap daerah tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, gender dan ras. Dalam pemerataan pendidikan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan seperti: angka melek huruf, ketidaksetaraan gender, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dan bagaimana ketimpangan pendapatan antarpenduduk apakah akan mempengaruhi terhadap hasil capaian pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith (2011) istilah yang paling banyak digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah produk nasional/regional bruto per kapita. Terkait dengan ketimpangan pendapatan, Kuznets menggunakan definisi pendapatan per kapita di dalam negeri turut andil dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. Temuan penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa

adanya hubungan positif antara pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendidikan (Abdelbaki, 2012; Coady & Dizioli, 2018; Soejoto et al., 2016). Hal ini terjadi karena pendapatan per kapita yang lebih tinggi menyebabkan distribusi pendapatan dan pendidikan yang lebih tidak merata (Lee & Lee, 2018). Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah dkk., 2017; Mesa, 2007; Khusaini et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa PDRB per kapita berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendidikan. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan di kabupaten berpenghasilan tinggi cenderung lebih tinggi daripada kabupaten berpenghasilan rendah, sehingga kemungkinan kesenjangan pendidikan yang terjadi di kabupaten yang berpenghasilan rendah akan lebih besar daripada di kabupaten berpenghasilan tinggi (Naveed et al., 2018).

Selain dari sisi ekonomi, ketimpangan pendidikan juga dapat disebabkan dari kondisi yang terjadi di masyarakat seperti kemampuan dalam membaca dan menulis huruf latin dan lainnya (BPS, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Banunu, 2021; Dedi Saputra, 2015) menunjukkan bahwa angka melek huruf berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Pendidikan. Tentunya adanya fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan kondisi kemampuan membaca dan menulis. Menurut Todaro (2009) menunjukkan bahwa penyediaan akan fasilitas pendidikan di suatu daerah ditetapkan oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Dimana dengan tingginya presentase alokasi anggaran daerah untuk pendidikan, maka diharapkan adanya pembangunan sekolah-sekolah baru, peningkatan kualitas tenaga pengajar dan perbaikan sekolah-sekolah akan mengurangi ketimpangan pendidikan.

Menurut Banunu (2021) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, artinya semakin tinggi anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah di suatu wilayah maka semakin rendah ketimpangan pendidikan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pendidikan secara signifikan. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah et al. (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Hal ini dikarenakan belanja pemerintah daerah untuk kepentingan pendidikan kurang efektif dalam merealisasikannya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, ketimpangan pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh kesenjangan *gender* dalam pendidikan, yang menunjukkan adanya suatu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan dan pelayanan (Nugroho, 2011). Kesenjangan gender dalam pendidikan masih meluas. Hal ini menyebabkan situasi malang yang sering terjadi pada anak perempuan terutama dari keluarga yang berpenghasilan rendah, dimana mereka sering menghadapi pilihan yang sangat sulit. Menurut Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa kebanyakan negara berkembang, perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Berdasarkan penelitian (Harahap et al., 2020; Nurmutiazifah & Yuniasih, 2021; Sholikhah et al., 2014) Menunjukkan bahwa ketimpangan *gender*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan, sehingga semakin lebar kesenjangan *gender* maka semakin tinggi angka ketimpangan pendidikan yang terjadi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hamzah et al., 2017; Banzragch et al., 2019) yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendidikan.

Menurut Nur Azmi Randa (2020) Ketimpangan pendidikan dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. pendidikan mempengaruhi pendapatan yang akan diterima seseorang, karena tingginya pendapatan masyarakat di pengaruhi oleh pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, hal ini dikarenakan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki sehingga produktivitas yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini berarti semakin baik kualitas sumber daya manusia yang diamati dari aspek pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, pendidikan akan merubah pola pikir seseorang menjadi modal bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghasilan yang layak (Todaro, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh (Nurmutiazifah & Yuniasih, 2021; Rodriguez-Pose & Tselios, 2011) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendidikan.

Berdasarkan dari latar belakang fenomena yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah, ketidaksetaraan *gender* dan ketimpangan pendapatan terhadap ketimpangan pendidikan di Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2020. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendidikan dengan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

2. METODE PENELITIAN

Beberapa indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur pencapaian pendidikan antardaerah yaitu angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun pada tiap jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Angka melek huruf juga menunjukkan adanya peningkatan yang serupa. Kemudian indikator-indikator ini dapat menunjukkan adanya suatu pencapaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antar jenis kelamin dan antara kabupaten atau kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan di wilayah kabupaten atau kota. Objek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 38 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dengan periode waktu yang digunakan tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Lembaga Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan. Data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data ketimpangan Pendidikan atau *Gini Education*, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, *Gender Gap*, dan ketimpangan pendapatan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel yaitu dengan menggabungkan data *time series* tahun 2016-2020 dan data *cross section* (kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diolah menggunakan *software* STATA. Variabel *dependent* yang digunakan yaitu Indeks Gini Pendidikan, koefisien Gini pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan distribusi rata-rata lama sekolah. Kemudian variabel *independent* yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan, *Gender Gap*, dan ketimpangan pendapatan. Dari beberapa variabel yang digunakan, berikut model penelitiannya:

$$EDU_INEQ_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln GRDP_{it} + \beta_2 LITERACY_RATE_{it} + \beta_3 EDUC_SPEND_{it} + \beta_4 GANDER_GAP_{it} + \beta_5 GINI_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Sumber
EDUC_INEQ = Indeks Ketimpangan Pendidikan, Indeks	Indeks Gini yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Badan Pusat Statistik
GRDP = PDRB Perkapita, Ribu Rupiah	PDRB Perkapita adalah indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kemakmuran suatu wilayah, yang dihitung dengan total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Badan Pusat Statistik
LITERACY_RATE = Angka Melek Huruf, Persen	Proporsi penduduk dengan kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Badan Pusat Statistik
EDUC_SPEND = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Rupiah	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran di sektor pendidikan wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Kementerian Pendidikan
GANDER_GAP = Ketimpangan Gender, Persen	Penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis menurut jenis kelamin wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Badan Pusat Statistik

Variabel	Definisi	Sumber
GINI = Ketimpangan Pendapatan, Indeks	Rasio Gini merupakan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2016-2020	Badan Pusat Statistik

Sumber: BPS & Kementerian Pendidikan, 2016-2020 (Data diolah)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan model terbaik dalam metode data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman*. Uji *chow* bertujuan untuk membandingkan antara *common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (FEM). Sedangkan uji *hausman* bertujuan untuk membandingkan antara *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, hasil uji *chow* menunjukkan bahwa model FEM lebih baik daripada CEM. Dan hasil uji *hausman* menunjukkan bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Terbaik

Variables	OLS	FEM	REM
lnGRDP	0.00940 (1.02)	1.258*** (6.83)	0.00940 (1.02)
LITERACY_RATE	-0.000276* (-2.35)	-0.000983*** (-6.80)	-0.000276* (-2.35)
EDUC_SPEND	-0.00863* (-2.49)	0.0369** (2.87)	-0.00863* (-2.49)
GANDER	0.234*** (13.20)	0.162*** (8.45)	0.234*** (13.20)
GINI	0.0516 (0.42)	0.157 (0.91)	0.0516 (0.42)
_cons	-0.0325 (-0.31)	-12.97*** (-6.75)	-0.0325 (-0.31)
N	167	167	167
R-squared	0.5833	0.7511	0.5833
Adj R-squared	0.5703	0.6668	0.5703

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Sumber: BPS & Kementerian Pendidikan, 2016-2020 (diolah)

Hasil output pengujian pemilihan model terbaik yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dimana model persamaannya sebagai berikut:

$$EDUC_INEQ_{it} = -12.97 + 1.258 \ln GRDP_{it} - 0.00098 LITERACY_RATE_{it} + 0.0369 EDUC_SPEND_{it} + 0.162 GANDER_GAP_{it} + 0.157 GINI_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Hasil regresi yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai β_0 sebesar -12.97 artinya menunjukkan ketika nilai PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, ketimpangan *gender* dan ketimpangan pendapatan sama dengan nol maka tingkat ketimpangan pendidikan sebesar 12,97. Nilai koefisien PDRB perkapita

sebesar 1,258 hal ini menunjukkan setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1 persen maka akan menaikkan ketimpangan pendidikan di kabupaten atau kota Jawa Timur sebesar 0,01258. Nilai koefisien angka melek huruf sebesar -0,00098 hal ini menunjukkan setiap kenaikan angka melek huruf sebesar 1 persen maka akan menurunkan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,00098. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 0,0369 hal ini menunjukkan setiap kenaikan pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan sebesar 1 Miliar Rupiah maka akan menaikkan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,0369. Nilai koefisien ketimpangan *gender* sebesar 0,162 hal ini menunjukkan setiap kenaikan ketimpangan *gender* sebesar 1 persen maka akan menaikkan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,162. Serta nilai koefisien ketimpangan pendapatan sebesar 0,157 hal ini menunjukkan setiap kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1 indeks maka akan menaikkan ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur sebesar 0,157.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa nilai *Jarque-Berra test* sebesar (69,137) dengan nilai *Probability* sebesar (0,000) kurang dari (<) nilai *Chi-Square_{table}* (216,649) dan nilai alfa (0,05) artinya, Tolak H_0 maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berdasarkan hasil multikolinearitas yang telah dihasilkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,80 sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pada hasil uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi menunjukkan bahwa hasil probabilitas lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah heterokedastisitas dan autokorelasi. Sehingga pengujian asumsi klasik pada data ini dapat disimpulkan terbebas dari masalah asumsi klasik.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Parsial

	EDUC_INEQ	lnGRDP	LITERACY_ RATE	EDUC_ SPEND	GANDER _GAP	GINI
EDUC_INEQ	1.0000					
lnGRDP	0.1366	1.0000				
LITERACY_RATE	0.3040	0.0187	1.0000			
EDUC_SPEND	-0.1823	-0.7322	-0.0419	1.0000		
GANDER_GAP	0.7152	-0.0953	0.5396	0.0691	1.0000	
GINI	-0.1387	0.1572	-0.1713	-0.081	-0.2600	1.000

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Tabel 4. Hasil Output Regresi Data Panel

variabel	coefficient	Std. Error	t- Statistic	Prob
lnGRDPP	1.257745	0.2059173	6.11	0.000
LITERACY_RATE	-0.00098	0.0001492	-6.59	0.000
EDUC_SPEND	0.036896	0.010643	3.47	0.001
GANDER_GAP	0.162028	0.0169993	9.53	0.000
GINI	0.157044	0.1210525	1.30	0.203
CONS	-12.97202	2.124484	-6.11	0.000

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan hasil uji t statistik variabel yang digunakan yaitu PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan ketimpangan *gender* berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di kabupaten atau kota Jawa Timur. Namun pada variabel ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di kabupaten/kota Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Hasil koefisien variabel PDRB perkapita menunjukkan hubungan positif terhadap kenaikan dan penurunan ketimpangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyadi, 2022; Adiningtyas & Budyanra, 2020; Soejoto et al., 2016) dimana pertumbuhan ekonomi menunjukkan meningkatnya akan pendapatan rata-rata masyarakat yang diterima. Pertumbuhan ekonomi secara riil tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendidikan, karena salah satunya dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang dimana secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi seperti halnya *output* atas suatu barang dan jasa meningkat, dan ini mempengaruhi pendapatan daerah dan masyarakatnya, tetapi dalam meningkatkan pendapatan tersebut tidak serta mempengaruhi belanja pemerintah daerah untuk sektor pendidikan. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tetapi tidak diimbangi dengan terealisasikannya kebijakan untuk mendukung bidang pendidikan, maka ketimpangan pendidikan akan terus mengalami peningkatan.

Dari model regresi menunjukkan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, dengan koefisien regresi sebesar 0,00098. Artinya setiap penambahan 1 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf akan menurunkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,00098 dengan asumsi *ceteris paribus*. Angka melek huruf dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan membaca dan menulis masyarakat, sehingga semakin tinggi kemampuan membaca dan menulis masyarakat untuk menyerap informasi maka akan membantu untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amin et.al., 2020; Banunu, 2021) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penduduk yang melek huruf, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membaca, menulis dan menyerap pengetahuan atau informasi sehingga akan menurunkan ketimpangan pendidikan.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, dengan koefisien regresi sebesar 0,036896. Artinya setiap peningkatan/penurunan Rp. 1,000 anggaran pendidikan maka dapat meningkatkan/menurunkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,036896 dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyadi, 2022; Amin et al., 2017 dan Sholikhah et al., 2014) yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan yang tidak terserap dengan merata maka akan mengakibatkan ketimpangan pendidikan antarwilayah. Sehingga Ketika terjadi peningkatan anggaran pendidikan antarwilayah maka akan menyebabkan terjadinya masalah penyerapan anggaran yang tidak

sesuai, sehingga akan menimbulkan tingginya tingkat ketimpangan pendidikan antarwilayah.

Ketidaksetaraan *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, dengan koefisien regresi 0,162028. Artinya setiap peningkatan ketidaksetaraan *gender* sebesar 1 persen maka akan meningkatkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,162028 persen dengan asumsi ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholikhah et al., 2014; Bustomi, 2012; Harahap et al., 2020) semakin tinggi ketidaksetaraan *gender* dalam memperoleh pendidikan maka akan meningkatkan ketimpangan pendidikan yang terjadi. Ketidakmerataan pendidikan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan *gender* dalam mengenyam pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa adanya fenomena dari kondisi atau budaya setempat yang menunjukkan masih banyaknya tradisi masyarakat yang menganggap bahwa perempuan hanya mempunyai peran menjadi ibu rumah tangga, sehingga mengakibatkan lebarnya *gap* capaian pendidikan antara perempuan dan laki-laki.

Hasil model regresi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan, namun memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, dengan koefisien regresi 0,157044. Artinya setiap peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1 indeks maka akan meningkatkan ketimpangan pendidikan sebesar 0,157044 indeks dengan asumsi ceteris paribus. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurmutiazifah & Yuniasih, 2021; Rodriguez-Pose & Tselios, 2011; Setyadi, 2022) yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ketimpangan pendapatan maka akan dibarengi dengan meningkatnya pula ketimpangan pendidikan yang terjadi, karena pendapatan yang diperoleh oleh penduduk sangat menentukan terkait dengan produktivitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan seseorang, sehingga ketika terjadinya ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah maka akan mengakibatkan ketimpangan pencapaian pendidikan yang diperoleh. Hal ini terjadi karena penduduk yang memperoleh pendapatan rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan dibandingkan dengan penduduk yang memperoleh pendapatan tinggi (Setyadi, 2022).

4. PENUTUP

Pendidikan memainkan peranan sentral dalam membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengoptimalkan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pendidikan menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara terus menerus harus menciptakan dan memastikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sekaligus mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua individu. Namun, dalam pencapaiannya isu ketimpangan pendidikan masih dikhawatirkan terus terjadi pada masyarakat diberbagai wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi tertinggi dalam pencapaian ketimpangan pendidikan di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari faktor sosial dan ekonomi dari variabel PDRB perkapita, angka melek huruf, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan ketidaksetaraan *gender* berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan pendidikan. Artinya, variabel tersebut dapat mengurangi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan variabel ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur.

Kemampuan menulis dan membaca masyarakat untuk menyerap pengetahuan dan informasi akan membantu mengurangi ketimpangan pendidikan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi di bidang *human capital*.

ketidaksetaraan *gender* yang masih tinggi diberbagai wilayah dapat menyebabkan tingginya ketimpangan capaian pendidikan yang terjadi, sehingga diperlukan kebijakan terutama untuk pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya peran pendidikan bagi perempuan dan laki-laki dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik tanpa mengorbankan budaya dan tradisi setempat, sehingga mampu menurunkan *gender gap* sebagai upaya penurunan tingkat ketimpangan pendidikan.

Anggaran pendidikan dan pendapatan per kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap peningkatan/penurunan ketimpangan pendidikan. Sehingga direkomendasikan perlu adanya pembenahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menempatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan yang lebih tepat sasaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Abdelbaki, H.H. (2012). An Analysis of Income Inequality and Education Inequality in Bahrain. *Modern Economy* 03(05): 675–685.
- Adiningtyas, A. P., & Budyanra, B. (2020). Determinants of Districts/Cities Education Attainment Inequality in East Java Province During 2014-2016. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 1. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.3.1-18>
- Alun, T., & Sakti, A. (2007). Analisis Aglomerasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terkonsentrasinya Lembaga Pendidikan Tinggi Di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 22(1), 1–22.
- Amin, A. M., Nuralifah, R., Putri, C., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F. (2017). DETERMINAN KETIMPANGAN CAPAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2017 (*Determinant of Inequalities in Education Achievement in Indonesia in 2017*). 2017, 593–601.
- Banunu Novianti. (2021). *Ketimpangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur: Evaluasi Kurva Kuznet dan Determinannya Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju Ketimpangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur: Evaluasi Kurva Kuznet dan Determinannya*. <https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.9>
- Banzragch, O., Mizunoya, S., & Bayarjargal, M. (2019). Education inequality in Mongolia: Measurement and causes. *International Journal of Educational Development*, 68(July 2018), 68–79. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.04.010>
- Bustomi Muhammad Ja'far. (2012). Ketimpangan Pendidikan Antar

- Kabupaten/Kota Dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
<https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.477>
- Coady, D. & Dizioli, A. (2018). Income inequality and education revisited: persistence, endogeneity and heterogeneity. *Applied Economics*, 50(25): 2747–2761.
- Dedi Saputra, M. (2015). Analisis Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 1–9.
- Hamzah, F., Rosyadi, R., & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 77.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>
- Harahap, E. S., Maipita, I., & Rahmadana, M. F. (2020). Determinant Analysis of Education Inequalities in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1067–1082.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.937>
- Khusaini, Remi, S. S., Fahmi, M., & Muhamad Purnagunawan, R. (2020). Measuring the Inequality in Education: Educational Kuznets Curve. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(3), 59–76.
<https://doi.org/10.17576/JEM-2020-5403-05>
- Naveed, T. A., Gordon, D., & Ullah, S. (2018). Measurement of Educational Disparities in Punjab (Pakistan): An Analysis from MICS 's Micro-data. *The Pakistan Journal of Social Issues*, IX(January): 26–49.
- Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Azmi Randa, S. U. S. (2020). Analisis Kausalitas Antara Ketimpangan Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 65–74.
- Nurmutiazifah, A., & Yuniasih, A. F. (2021). Penerapan Model Regresi Data Panel: Determinan Ketimpangan Capaian Pendidikan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1)*, 1294–1304.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.705>
- Ozturk, Ilhan. (2001). The Role of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective. 2001. *Journal of Rural Development & Administration, Volume XXXIII*, No. 1, Winter 2001, pp. 39-47
- Rodríguez-Pose, A., & Tselios, V. (2011). The determinants of regional educational inequality in Western Europe. *Advances in Spatial Science*, 66, 135–163. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14965-8_7
- Sholikhah, N., Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(20), 176–182.

- Setyadi, S. (2022). Inequality of Education in Indonesia by Gender , Socioeconomic Background and Government Expenditure. *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 17(1), 27–36. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2022.17.1.2895>
- Soejoto, A., Subroto, W. T., Rachmawati, L., & Sholikhah, N. (2016). Education inequality effect on poverty and economic growth: Empirical study in province of East Java. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(6), 4087–4103.
- Suryanti, M., & Sholikhah, N. (2021). *Gender gap sebagai determinan ketimpangan pendidikan kabupaten / kota provinsi jawa timur Gender gap as a determinant of education inequality in districts / cities in east java province*. 23(2), 285–294.

Buku :

- Badan Pusat Statistik. (2014). Jawa Timur dalam Angka 2014. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Lee, J. W., & Lee, H. (2018). Human capital and income inequality. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(4): 554–583.
- Mesa, E. P. (2007). Measuring Education Inequality in the Philippines. *The Philippine Review of Economics XLIV*(No.2): 33–70.
- Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X. (2001). A New Dataset on Inequality in Education: Gini & Theil Indices of Schooling for 140 countries, 1960-2000. *World Bank research paper No. 2525*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. (2009). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.